

Implementation Of The Smart Indonesia Program Policy at Damarsi Elementary School, Sidoarjo Regency

[Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo]

Intan Dwi Afiaitus Sholicha¹⁾, Hendra Sukmana ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. This study focuses on the implementation of the Indonesia Smart Program (Program Indonesia Pintar or PIP) at SDN Damarsi, Sidoarjo Regency, aiming to understand how the program is carried out and to identify the various factors influencing its success. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through direct observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and included the Principal, PIP Supporting Teachers, PIP Operator, and parents of student beneficiaries. The data analysis process involved stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. This research refers to Edward III's (1980) public policy implementation theory, which suggests that policy success is strongly influenced by the quality of communication, adequacy of resources, implementers' attitudes, and a supportive bureaucratic structure. The findings show that communication in the implementation of PIP at SDN Damarsi has been carried out but some parents do not understand the procedure for disbursing assistance. Resources in the implementation of PIP at SDN Damarsi have been sufficient in terms of implementing personnel and administrative facilities. Disposition shows challenges in the selection of aid recipients because some eligible students are not accommodated so that better evaluation and coordination are needed. The bureaucratic structure implemented has shown a clear system in program implementation.

Keywords - Implementation; Policy; Smart-Indonesia-Program; Elementary-School.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, dengan tujuan untuk memahami program tersebut dijalankan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, mencakup Kepala Sekolah, Guru Pendamping PIP, Operator PIP, serta orang tua siswa penerima bantuan. Proses analisis data mencakup tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan publik dari Edward III (1980), yang memandang bahwa keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, dan tatanan birokrasi yang mendukung. Hasil temuan menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah dilakukan tetapi sebagian wali murid belum memahami prosedur pencairan bantuan. Sumber daya dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah mencukupi dari segi tenaga pelaksana dan fasilitas administrasi. Disposisi menunjukkan tantangan dalam seleksi penerima bantuan karena beberapa siswa yang memenuhi syarat tidak terakomodasi sehingga diperlukan evaluasi dan koordinasi yang lebih baik. Struktur birokrasi yang diterapkan telah menunjukkan adanya sistem yang jelas dalam pelaksanaan program

Kata Kunci - Implementasi; Kebijakan; Program-Indonesia-Pintar; Sekolah Dasar.

I. PENDAHULUAN

Hak memperoleh pendidikan dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan dijamin oleh negara. Pernyataan ini memperjelas bahwa semua orang berhak memperoleh kesempatan belajar yang bermutu sesuai dengan potensi dan minatnya, tanpa dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, agama, gender, suku maupun etnis. Tujuan pendidikan nasional Indonesia telah ditetapkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, dimana disebutkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konstitusi tersebut tetap menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pada Pasal 1, lebih lanjut dinyatakan bahwa Hak untuk memperoleh pendidikan dijamin bagi setiap warga negara berdasarkan ketentuan hukum [1]. Faktor yang menghambat pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan dalam akses pendidikan yang menyebabkan angka putus sekolah meningkat. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di

Indonesia, diperlukan langkah-langkah seperti memperluas akses yang merata, menambah alokasi dana pendidikan, menekan jumlah siswa putus sekolah, serta mengatasi permasalahan kemiskinan [2], berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP). Agar program ini lebih efektif dan tepat sasaran, kebijakan yang mengaturnya terus disesuaikan sejalan dengan komitmen memperkuat pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia [3].

Sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari latar belakang menengah ke bawah, Pemerintah menghadirkan Program Indonesia Pintar (PIP) guna meringankan beban biaya pendidikan. Kebijakan ini menyediakan subsidi uang untuk biaya pendidikan yang diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar [4]. Program Indonesia Pintar (PIP) sangat membantu siswa dari latar belakang ekonomi lemah, dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan pendidikan karena siswa seringkali menghadapi risiko tinggi untuk putus sekolah akibat masalah finansial banyak siswa dari keluarga miskin terpaksa tidak melanjutkan pendidikan dan terpaksa bekerja demi mendukung perekonomian mereka [5]. Anak-anak berusia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), dan anak yatim piatu menjadi prioritas utama dalam pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020. Program ini juga mencakup anak-anak yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerima manfaat PIP [6]. Bantuan pendidikan dari pemerintah diberikan kepada siswa pemegang KIP di berbagai tingkat pendidikan. Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan siswa di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Sekolah Menengah Atas/Kejuruan. Setiap tahunnya, siswa SD menerima Rp 450.000, siswa SMP mendapat Rp 750.000, dan siswa SMA atau SMK memperoleh Rp 1.000.000. Para siswa diharapkan dapat mempergunakan bantuan ini secara optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, misalnya biaya akomodasi, perlengkapan belajar, dan uang saku [7]. Kendati demikian, meskipun program dilaksanakan memiliki tujuan yang baik, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan. Kendala yang dihadapi antara lain adalah ketidaksinkronan data antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kesalahan penginputan data oleh operator, serta tidak terpenuhinya persyaratan penerima bantuan. Hal ini menyebabkan beberapa siswa yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak menerima dukungan yang mereka perlukan. diharapkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar dapat semakin optimal sehingga lebih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat merasakan manfaatnya. Berbagai daerah di Indonesia telah menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) di sekolah, termasuk SD Negeri Damarsi, Kabupaten Sidoarjo.

SD Negeri Damarsi yang terletak di Jalan Ir. H Juanda, Desa Damarsi, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur merupakan lembaga pendidikan yang berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua siswanya. Di sekolah ini ada beberapa siswa telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bentuk dukungan dalam menanggung biaya pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan. Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Damarsi dilaksanakan secara teknis dengan melibatkan pemerintah daerah, bank penyalur dana serta lembaga Pendidikan. Dana PIP dapat dicairkan atau diterima oleh peserta didik atau perwakilan melalui rekening bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Selanjutnya, untuk penerimaan dana bantuan di SD Negeri Damarsi Kabupaten Sidoarjo diberikan secara individual oleh siswa atau wali murid dengan memenuhi persyaratan dokumen pendukung. Dokumen yang harus dibawa meliputi kartu identitas seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) serta buku tabungan yang telah didaftarkan. Langkah ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi siswa atau keluarganya dalam mengakses dana bantuan secara langsung di bank atau lembaga penyalur yang telah ditunjuk. Namun, banyak siswa sebenarnya memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan ini tetapi tidak semua dari mereka berhasil terdaftar sebagai penerima dan terdapat penerima bantuan PIP yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan siswa dan wali muid terutama bagi mereka yang mengandalkan dana tersebut untuk pembelian buku, alat tulis, serta biaya transportasi termasuk dalam kebutuhan pendidikan sehari-hari.

Data yang diperoleh dari SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 51 siswa menerima bantuan PIP. Namun, pada tahun 2022, jumlah penerima mengalami penurunan signifikan menjadi 22 siswa. Penurunan berlanjut pada tahun 2023, di mana hanya 18 siswa yang tercatat sebagai penerima bantuan. Berdasarkan data yang telah dihimpun, penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Penurunan jumlah penerima bantuan PIP di SD Negeri Damarsi disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan dalam kriteria seleksi penerima bantuan yang lebih ketat, di mana bantuan hanya diberikan kepada peserta didik yang memenuhi persyaratan lebih selektif, penurunan jumlah siswa yang memenuhi kriteria, atau perubahan dalam alokasi dana yang tersedia. Meskipun ada penurunan jumlah penerima bantuan PIP di SD Negeri Damarsi, program tetap memberikan dampak positif bagi siswa yang terpilih dalam membantu mereka membiayai kebutuhan sekolah dan meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang membutuhkan bantuan finansial. Fasilitas yang diberikan kepada siswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi memungkinkan para siswa untuk tetap melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya, Program Indonesia Pintar (PIP) membuktikan pentingnya perannya dalam mendukung akses pendidikan yang merata. Melalui bantuan, siswa yang sebelumnya mengalami

kesulitan untuk membayar biaya pendidikan dapat tetap melanjutkan sekolah dan mendapatkan kesempatan yang setara dengan teman-teman mereka. Sehingga manfaat yang diberikan tetap besar dalam membantu menciptakan pemerataan di dunia pendidikan.

Pada penelitian terdahulu yang pertama yaitu dilakukan oleh Baihaqi (2023) dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di MTsN 3 HSU Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) masih menghadapi banyak tantangan, misalnya hambatan utama terdapat pada aspek komunikasi, di mana penyampaian informasi kepada orang tua siswa belum berjalan secara efektif. Akibatnya, banyak yang belum memahami tujuan dan mekanisme program secara menyeluruh. Selain komunikasi, kejelasan informasi juga perlu ditingkatkan agar semua pihak yang terlibat dapat lebih memahami setiap prosedur yang berlaku. Sementara itu, dari sisi konsistensi pelaksanaan, program sudah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada aspek sumber daya, keterbatasan tenaga ahli menjadi faktor penghambat. Minimnya staf yang memiliki keahlian khusus dalam pengelolaan Program Indonesia Pintar berdampak pada efektivitas implementasi di lapangan. Pengembangan kualitas SDM merupakan aspek krusial untuk memastikan program berjalan lebih optimal [8].

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Harun (2021) dengan judul “Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Smrn 3 Banjarbaru Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMPN 3 Banjarbaru telah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebanyak 228 siswa di sekolah ini menerima manfaat dari program tersebut. Namun, terdapat sejumlah masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat lagi karena peningkatan pendapatan orang tua atau wali siswa tersebut. Proses yang dilakukan mulai dari rekapitulasi data, verifikasi, hingga input data penerima KIP ke Dapodik, hingga pencairan dan penggunaan dana KIP oleh siswa sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, masih ada sejumlah penerima KIP dan wali siswa yang belum sepenuhnya memahami cara penggunaan dana KIP, yang terkadang digunakan untuk keperluan di luar konteks pendidikan dan sekolah [9].

Ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Anggleni (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang”. Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, belum menunjukkan hasil yang maksimal, sebagaimana terindikasi dari beberapa penerima bantuan yang belum terdaftar. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan hanya terbatas pada kelompok penerima KKS, sehingga masih banyak yang kurang memahami program ini. Pendataan yang digunakan pemerintah, yang mengacu pada data Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS), juga menjadi faktor kendala. Data tersebut tidak mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada saat ini di lapangan, sehingga program ini kurang efektif dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah untuk memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, serta melakukan validasi dan pembaruan data agar dapat mengurangi potensi ketidakpuasan sosial di kalangan warga [10].

Berdasarkan hasil observasi di lapangan implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Damarsi, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi beberapa hambatan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, Pendistribusian PIP kurang merata. Banyak siswa yang memenuhi syarat agar bisa menerima bantuan, namun namanya tidak tercantum sebagai penerima resmi sementara siswa yang tidak memenuhi kriteria ekonomi justru menerima bantuan tersebut. Hal ini menyebabkan distribusi yang tidak adil dan mengurangi keuntungan program yang seharusnya diberikan kepada siswa yang benar-benar membutuhkannya. Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai tujuan dan prosedur program ini menyebabkan minimnya pemahaman dikalangan orang tua dan siswa penerima bantuan. Ketiga, pengawasan terhadap siswa yang menerima bantuan PIP juga masih sangat minim, yang menambah tantangan dalam implementasinya. Bantuan tidak dapat dipastikan sampai ke siswa yang membutuhkannya jika tidak ada pengawasan yang memadai dari pihak terkait.

Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SD Negeri Damarsi, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo penulis menggunakan indikator keberhasilan menurut teori implementasi kebijakan Edward III (1980) yang meliputi: Pertama, komunikasi berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran serta memastikan kebijakan dapat diterapkan dengan baik. Dengan komunikasi yang efektif, pesan dapat diketahui dan dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak terkait, sehingga mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan. Kedua, mencakup peninjauan terhadap sumber daya yang tersedia dan berasal dari segi SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Ketiga, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh disposisi, yakni kesungguhan para pembuat kebijakan dalam mengimplementasikannya secara konsisten. Sikap dan komitmen pelaksana menjadi elemen kunci dalam memastikan kebijakan agar terlaksana sesuai dengan sasaran yang sudah dirancang. Keempat, pada struktur birokrasi terdapat dua komponen utama, salah satunya adalah Standar Operasional Prosedur (SOP), yang berkontribusi dalam keberhasilan penerapan kebijakan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program Indonesia pintar di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti

mengangkat judul mengenai Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SD Negeri Damarsi Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam situasi alami objek penelitian. Sehingga, penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program Indonesia Pintar di SD Negeri Damarsi. Lokasi penelitian dilakukan di SD Negeri Damarsi yang terletak di Jalan Ir. H Juanda, Desa Damarsi, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Dalam proses penelitian, pengumpulan data menjadi langkah penting untuk memastikan hasil yang diperoleh bersifat sistematis dan akurat. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pengumpulan data antara lain: (a) observasi, yakni melakukan pengamatan langsung terhadap objek atau subjek yang diteliti dengan mencatat berbagai aspek yang relevan. (b) wawancara, yaitu interaksi langsung dengan responden untuk menggali informasi yang lebih rinci melalui tanya jawab. (c) dokumentasi, yang berfungsi sebagai referensi tambahan guna meningkatkan validitas data dengan merujuk pada dokumen atau catatan yang telah tersedia [11]. Penelitian ini menerapkan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, di mana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki relevansi dan nilai yang maksimal bagi penelitian. Penelitian ini melibatkan empat informan utama, yaitu Kepala Sekolah, Guru Pendamping PIP, Operator PIP, serta orang tua atau siswa penerima bantuan PIP. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data interaktif menurut Miles dan Huberman (1994:12), yang mencakup empat langkah utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara terstruktur dan mendalam terhadap objek kajian [12].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan pemerintah sejak 2015 untuk mendukung wajib belajar 12 tahun menggantikan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) [13]. Di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, penerima Program Indonesia Pintar (PIP) adalah siswa yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan dalam hal biaya pendidikan. Diharapkan, melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), kehidupan mereka dapat meningkat, terutama dengan bantuan untuk membeli peralatan sekolah dan mencukupi kebutuhan uang saku. Setiap tahun, mereka menerima dana bantuan sebesar Rp 450.000, yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan biaya transportasi [14]. Program ini bertujuan memastikan semua siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III (1980) dengan empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Oleh karena itu, peneliti menjadikan empat indikator tersebut sebagai dimensi utama dalam penelitian implementasi kebijakan indonesia pintar pada SDN Damarsi di Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini merupakan penjabaran terkait pembahasan dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti selama turun lapangan yang dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan komunikasi yang mencakup penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Sejalan dengan prinsip tersebut, sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi telah berlangsung pada tahun 2020. Kementerian Pendidikan terus menyebarkan informasi secara konsisten di lingkungan pendidikan. Komunikasi juga berarti penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh para pelaku kebijakan agar mereka memahami tindakan yang perlu diambil. Penyampaian informasi yang tepat dan jelas sangat penting untuk memastikan kebijakan tercapai dengan baik dan pencapaian yang sudah diharapkan [15].

Sosialisasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, telah dimulai dengan baik pada tahap awal. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Sidoarjo berjalan baik pada tahap awal melalui rapat, namun tidak ada sosialisasi lanjutan setelah itu. Hal ini menyebabkan pemahaman terbatas di kalangan penerima manfaat seperti siswa dan wali murid mengenai cara kerja dan mekanisme program tersebut. Komunikasi yang kurang maksimal menghambat mereka dalam memahami prosedur yang benar. Diperlukan sosialisasi berkelanjutan agar informasi tentang PIP dapat dipahami dengan lebih baik memastikan tujuan program tercapai secara maksimal. Seperti yang disampaikan oleh informan Ibu Dwi selaku walimurid penerima bantuan PIP :

“Tidak ada rapat atau sosialisasi khusus terkait penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP). Informasi mengenai penerimaan program ini disampaikan oleh walikelas bahwa anak saya termasuk dalam daftar penerima bantuan PIP melalui via whatsapp. Setelah itu, saya dipanggil oleh pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut bahwa anak saya mendapatkan bantuan PIP”. (Wawancara 15 Januari 2025).

Adapun dokumentasi sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan kepada orang tua murid dan siswa penerima dana PIP pada awal penerapan.

Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Program Indonesia Pintar



Sumber : Diolah dari SDN Damarsi, 2025

Pada gambar diatas terlihat para wali murid SDN Damarsi, Sidoarjo, menghadiri sosialisasi pertama Program Indonesia Pintar (PIP) di ruang kelas. Sosialisasi ini ditujukan untuk siswa dan wali murid penerima bantuan. Namun, sejak tahun-tahun berikutnya, sosialisasi hanya dilakukan melalui WhatsApp yang menyebabkan kurangnya pemahaman tentang PIP. Akibatnya, sering terjadi kesalahan dalam pemenuhan syarat atau data penerima yang kurang lengkap, sehingga sosialisasi di SDN Damarsi masih belum maksimal. Hal tersebut diperkuat oleh informan Ibu Frida selaku guru pendamping PIP:

“Menurut Ibu Frida, pengurus pendamping PIP di SDN Damarsi, sebenarnya dulu pernah mbak mengadakan sosialisasi di 2020 mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) yakni bentuk rapat yang dihadiri oleh para wali murid. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah bersama pengurus pendamping PIP menjelaskan berbagai aspek penting terkait program ini, seperti syarat penerima, kriteria kelayakan, serta tujuan utama dari bantuan yang diberikan. Namun, dalam seiringnya waktu metode komunikasi lebih banyak beralih ke WhatsApp karena dianggap lebih praktis dan efisien. Meski begitu, banyak wali murid yang masih belum sepenuhnya memahami informasi mengenai PIP. “Sebagian besar wali murid hanya tahu bahwa mereka menerima bantuan, tetapi kurang memahami syarat, kriteria, serta tujuan utama program ini.” (Wawancara 15 Januari 2025).

Hal ini dinyatakan bahwa perlu ada rapat atau pertemuan rutin setiap tahun untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada wali murid sehingga pelaksanaan program mampu beroperasi dengan lebih efisien serta memenuhi tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan temuan Baihaqi (2023), yang menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) adalah sosialisasi yang masih kurang efektif, selain terlambatnya pencairan dana dan ketidaktepatan dalam verifikasi data calon penerima, yang berdampak terhadap ketidakseimbangan pemerataan pendidikan. Dengan demikian, kendala sosialisasi di SDN Damarsi bukan hanya situasional, tetapi juga mencerminkan pola yang lebih luas dalam pelaksanaan PIP di Indonesia. Berdasarkan fenomena di lapangan mengenai komunikasi dalam penyampaian informasi PIP di SDN Damarsi masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori implementasi Edward III (1980). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting seperti komunikasi, ketersediaan sumber daya, kesiapan pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung. Namun, dalam pelaksanaan program bantuan, masih ditemukan hambatan yang signifikan. Meskipun informasi mengenai penerima bantuan telah disampaikan melalui wali kelas, pemahaman yang tidak merata di kalangan wali murid dan peserta didik tentang prosedur pencairan dana menjadi kendala utama. Kurangnya sosialisasi langsung melalui pertemuan atau rapat juga menyebabkan informasi yang diterima oleh sebagian orang tua belum menyeluruh dan komprehensif.

Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan akan menghadapi kendala. Dalam konteks PIP di SD Negeri Damarsi, ketersediaan sumber daya yang memadai menjadi faktor utama agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan. Setiap tahapan implementasi memerlukan sumber daya yang berkualitas untuk mencapai hasil yang optimal [16]. Menurut Edward III dalam Widodo (2017:98) mengatakan bagaimanapun ketentuan atau aturan yang ada sudah sangat jelas dan konsisten sehingga keberhasilan penerapan kebijakan dapat dijalankan dengan optimal, ketersediaan sumber daya yang mencakup tenaga kerja kompeten menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dukungan anggaran yang memadai, fasilitas dan perlengkapan yang sesuai, serta wewenang yang jelas untuk menjalankan tugas secara optimal. Berikut ini informasi hasil wawancara bersama Bapak Ali selaku Kepala Sekolah SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo :

“Menurut saya untuk sumber daya mengenai bantuan pip ini sudah cukup memadai dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan adanya kesiapan ini, sekolah dapat memastikan bahwa program PIP dapat tersalurkan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa yang membutuhkan bantuan pendidikan”. (Wawancara 15 Januari 2025).

Fakta ini ditegaskan oleh informan Bapak Aris selaku operator PIP :

“Untuk sumber daya sudah mumpuni dan tidak ada masalah, Mbak. Untuk program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), biasanya saya memproses pengusulan dengan melakukan entry data ke dalam sistem Dapodik. Proses ini dilakukan dengan teliti untuk memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan. saya juga memverifikasi data siswa yang memenuhi syarat agar tidak ada kesalahan dalam pengusulan bantuan tersebut, lalu dari situ siswa diberikan info oleh wali kelas bahwa mereka berhak memiliki KIP, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga harus segera melapor. Setelah laporan diterima, wali kelas membantu memeriksa dan mendata siswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan”. (Wawancara 16 Januari 2025).

Hal ini menyatakan bahwa sumber daya yang diakses untuk mendukung pengelolaan program bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) sudah cukup memadai dan berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah. Agar Program Indonesia Pintar (PIP) dapat terlaksana secara efisien dan tepat sasaran di SDN Damarsi, dibutuhkan pembagian peran yang jelas di antara para pelaksanaanya. Setiap individu terlibat sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan, sehingga koordinasi dan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Untuk memperjelas rincian peran tersebut, disusunlah tabel yang memuat uraian tugas masing-masing pelaksana PIP di lingkungan SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaksana Program Indonesia Pintar SDN Damarsi

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Ali Sadikin, S.Pd	Kepala Sekolah	Penanggungjawab PIP
2	Fridah Indah Sari, S.Pd	Guru Pendamping PIP	Membantu mengidentifikasi siswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan, mensosialisasikan program kepada siswa dan orang tua, serta memastikan proses administrasi ke bank dan melengkapi data siswa berjalan dengan lancar
3	M.Aris Faizin, S.Pd	Operator PIP	Mendaftarkan siswa yang sesuai dengan kriteria PIP serta memverifikasi kelayakan siswa sebagai penerima bantuan.
4	Samiati, S.Pd	Wali Kelas	Mengumpulkan data siswa dengan keterbatasan ekonomi di kelasnya

Sumber : Diolah dari SDN Damarsi, 2025

Dari tabel di atas, setiap pihak di SDN Damarsi memiliki peran penting dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP). Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab utama dan memastikan program berjalan sesuai aturan. Guru pendamping memiliki tugas mengidentifikasi siswa yang berhak menerima bantuan, mensosialisasikan program kepada siswa dan orang tua serta memastikan kelancaran proses administrasi. Operator PIP berperan dalam pendaftaran dan verifikasi kelayakan siswa sebagai penerima bantuan. Sementara itu, wali kelas bertugas mendata siswa dari latar belakang ekonomi kurang beruntung di kelasnya. Dalam implementasi kebijakan disamping membutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan program indonesia pintar tersebut. Berikut tabel daftar sarana dan prasarana dalam implementasi program indonesia pintar di SDN Damarsi :

Tabel 2. Daftar Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	KETERANGAN	KONDISI
1	Ruang Kepala Sekolah	Koordinasi dan pengawasan Pelaksanaan PIP	Baik
2	Meja dan kursi Guru	Untuk pelayanan administrasi PIP	Baik
3	Papan Tulis	Pengumuman penerima dan info jadwal pencairan	Cukup
4	Komputer	Input data penerima PIP melalui dapodik	Baik
5	Printer	Mencetak SK PIP, formulir dan surat keterangan	Baik

Sumber : Hasil olah data peneliti, 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah mendukung pelaksanaan kegiatan administrasi Program Indonesia Pintar (PIP) dengan baik. Ketersediaan perangkat dan sumber daya yang memadai menjadi faktor penting dalam kelancaran layanan administrasi di sekolah tersebut. Selain itu, berbagai perlengkapan pendukung yang ada telah memenuhi standar kebutuhan dan difungsikan dengan baik dalam operasional harian. Selanjutnya, pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil wawancara dari Ibu Frida selaku guru pendamping PIP sebagai berikut :

"Kami memastikan bahwa setiap anggaran yang diterima digunakan dengan tepat sasaran. Kami bekerja sama dengan operator PIP untuk memverifikasi kelayakan siswa dan memastikan dana tersebut disalurkan kepada mereka yang berhak. Selain itu, kami selalu mengutamakan transparansi dalam setiap penggunaan anggaran agar bisa memberikan manfaat maksimal kepada siswa yang membutuhkan." (Wawancara 16 Januari 2025)

Hal ini diartikan bahwa pengelolaan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Setiap dana yang diterima diatur dan digunakan secara tepat sasaran untuk memastikan bantuan disalurkan kepada siswa yang memenuhi kriteria. Rekapitulasi dana bantuan pip diterima dan disalurkan SDN Damarsi dapat dibuktikan dengan data dibawah ini :

Tabel 3. Rekapitulasi dana bantuan pip diterima dan disalurkan SDN Damarsi

NO	Tahun	Dana Diterima	Dana Disalurkan
1	2021	22.500.000,00	22.500.000,00
2	2022	9.900.000,00	9.900.000,00
3	2023	8.100.000,00	8.100.000,00

Sumber : Diolah dari SDN Damarsi, 2025

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di sekolah telah memadai, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan kompetensi pada aspek administrasi dan pendataan. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggleni (2018) mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang". Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, yang menemukan bahwa sumber daya manusia berperan penting dalam memastikan kelancaran program, terutama dalam hal verifikasi data penerima dan koordinasi antar pihak terkait. Perbedaannya, pada penelitian ini keterbatasan sumber daya manusia lebih disebabkan oleh beban kerja ganda guru dan staf sekolah, sedangkan pada penelitian terdahulu hambatan yang muncul lebih pada kurangnya pelatihan teknis terkait prosedur program. Berdasarkan fenomena di lapangan mengenai sumber daya dalam Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sesuai dengan indikator keberhasilan menurut teori Edward III (1980) yang menekankan pentingnya ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya secara efektif dalam keberhasilan suatu kebijakan. Dalam hal ini, SDN Damarsi telah menunjukkan pengelolaan yang baik dengan memastikan bahwa dana yang diterima dan disalurkan selalu sama mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Sumber daya manusia seperti kepala sekolah, operator PIP, wali kelas, dan guru pendamping telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memastikan data penerima akurat serta administrasi berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan [17]. Selain itu, penggunaan sumber daya fisik dan teknologi seperti komunikasi melalui WhatsApp telah membantu mempercepat penyampaian informasi kepada wali murid mengenai pencairan bantuan. Dengan adanya dukungan anggaran yang memadai serta optimalisasi sumber daya yang ada pelaksanaan PIP di SDN Damarsi dapat berjalan dengan efektif sehingga tujuan utama program yaitu membantu keberlanjutan pendidikan bagi siswa kurang mampu dapat tercapai secara maksimal.

Disposisi

Disposisi para pelaksana kebijakan, yang mencakup sikap, nilai, serta kecenderungan dalam menjalankan tugas, berperan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam konteks ini, disposisi mengacu pada sikap dan kemauan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan tekad dan keseriusan. Menurut Edward III, selain pengetahuan dan kemampuan teknis, disposisi yang baik dari pelaksana juga sangat penting. Pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan dan kesadaran untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab karena tanpa disposisi yang tepat, implementasi kebijakan bisa gagal meskipun secara teori kebijakan telah dirancang dengan baik. Ketika pelaksana memiliki disposisi yang kuat, kecenderungan untuk mengatasi hambatan atau tantangan selama proses pelaksanaan kebijakan akan meningkat. Upaya yang dilakukan akan lebih maksimal untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai [18].

Dalam pelaksanaan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi, beberapa masalah berkaitan dengan distribusi dan pengawasan masih menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan program. Pendistribusian bantuan belum merata; terdapat siswa yang memenuhi kriteria tetapi tidak menerima bantuan, sedangkan terdapat pula siswa yang tidak sesuai kriteria namun justru terdapat sebagai penerima [19]. Ketidaktepatan dalam proses seleksi penerima bantuan menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian antara sumber daya pelaksana dengan tugas yang harus dijalankan. Kepala sekolah menyampaikan bahwa pengajuan siswa telah dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi, namun keputusan akhir berada di tangan Dinas Pendidikan berdasarkan penilaian terhadap kriteria tertentu. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kewenangan dan koordinasi dari pihak sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Kemampuan teknis untuk mengidentifikasi siswa yang layak sebenarnya telah dimiliki oleh sekolah, namun minimnya pelibatan dalam proses akhir menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang dibebankan. Kepala sekolah telah melaksanakan tugas sesuai perannya sebagai pengusul penerima bantuan berdasarkan data riil di lapangan, namun keterbatasan wewenang dalam tahap akhir seleksi menjadi hambatan. Guru yang membantu proses administrasi pendataan penerima bantuan belum sepenuhnya sesuai dengan tugas utama, karena harus membagi waktu dan perhatian antara tanggung jawab mengajar dan pekerjaan administratif terkait program. Seperti yang disampaikan oleh informan Ibu Frida selaku guru pendamping PIP :

” Kalau mengenai sumber daya manusia. yang terlibat dalam pelaksanaan program sudah menjalankan tugas sesuai peran masing-masing. Guru, staf administrasi, dan pihak sekolah telah bekerja berdasarkan pembagian tanggung jawab yang jelas, sehingga koordinasi berjalan cukup baik. Namun, pada saat memasukkan data ke dalam sistem Dapodik, sering kali terjadi kendala seperti sistem yang lemot, terutama ketika banyak sekolah yang melakukan input data secara bersamaan di Dapodik “. (Wawancara 16 Januari 2025)

Hal ini menyatakan bahwa pembagian peran dan koordinasi sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik, keberhasilan pelaksanaan program tetap dipengaruhi oleh faktor teknis. Kendala pada sistem Dapodik, seperti kecepatan akses yang menurun saat digunakan secara bersamaan oleh banyak sekolah, dapat menghambat kelancaran proses administrasi. Situasi ini menunjukkan bahwa dukungan teknologi dan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan agar tugas-tugas administratif dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengganggu fokus utama guru maupun staf sekolah.

Sejalan dengan analisis pada indikator disposisi, temuan di SDN Damarsi ini memiliki kemiripan dengan hasil penelitian Anggleni (2018) mengenai mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang”. Penelitian tersebut mengungkap bahwa meskipun terbatasnya kuota menjadi tantangan utama, disposisi pelaksana tetap terjaga melalui koordinasi antar instansi yang aktif, disiplin pelaksanaan yang tinggi, serta kemauan beradaptasi untuk memastikan bantuan tepat Sasaran. Perbedaan mendasar terletak pada bentuk hambatan yang dihadapi di SDN Damarsi hambatan bersifat struktural dan administratif seperti keterbatasan kewenangan pengambilan keputusan dan arus informasi yang tidak optimal, sedangkan di Kelurahan Sekip Jaya hambatan lebih bersifat ketidaksesuaian data penerima program KKS ini sehingga belum tepat Sasaran namun tidak sampai melemahkan komitmen dan sikap positif pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa disposisi yang kuat dapat bertahan meskipun menghadapi keterbatasan, asalkan ada koordinasi dan komunikasi yang solid antar pemangku kepentingan.

Jika merujuk pada teori implementasi kebijakan Edward III (1980), pelaksanaan disposisi dalam Program Indonesia Pintar (PIP) masih memerlukan penguatan. Pelaksana kebijakan seperti pihak sekolah dan Dinas Pendidikan seharusnya memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan program serta menjalin kerja sama yang lebih erat untuk memastikan keberpihakan terhadap siswa yang benar-benar membutuhkan. Namun, implementasi di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksana menghadapi kendala tidak hanya dari disposisi individu, melainkan juga dari keterbatasan dalam otoritas pengambilan keputusan, koordinasi lintas lembaga, dan kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi faktual di lingkungan sekolah. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, mencakup asesmen terhadap kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi pendukung, serta mekanisme koordinasi, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan adil, tepat Sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan pendidikan secara merata [20].

Struktur Birokrasi

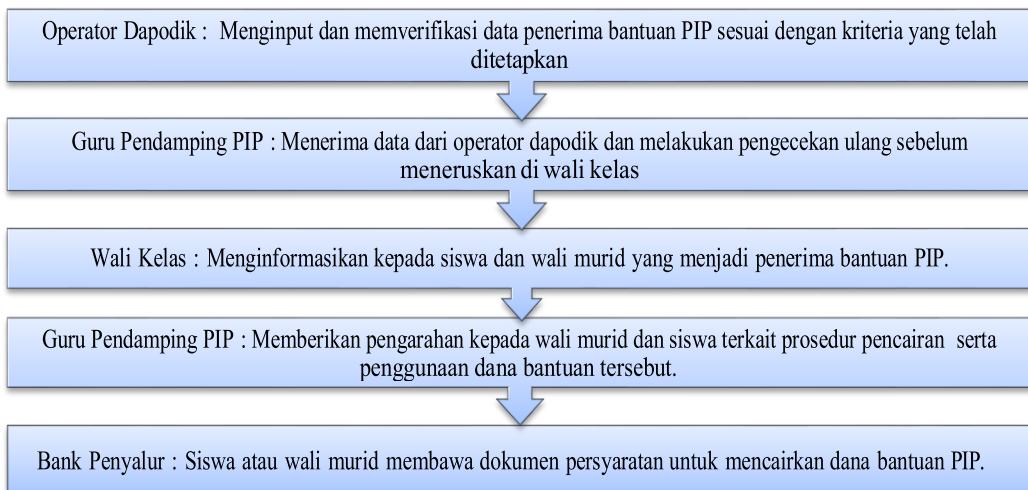
Keberhasilan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo juga bergantung pada struktur birokrasi yang melibatkan koordinasi antara berbagai instansi, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat pusat hingga pelaksana di tingkat sekolah. Menurut Edward III, birokrasi mencakup fragmentasi dan prosedur operasional yang memudahkan pelaksanaan tugas. Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan sekolah. Koordinasi efektif antar instansi, seperti verifikasi data penerima bantuan dan pengawasan distribusi sangat penting agar kebijakan berjalan dengan baik. Tanpa struktur birokrasi yang jelas implementasi PIP tidak akan optimal, dan tujuan pemberian bantuan pendidikan tidak tercapai [21]. Struktur yang baik mendukung keberhasilan implementasi PIP dengan memastikan prosedur dilaksanakan

dengan benar. Berikut ini informasi hasil wawancara bersama Bapak Ali selaku Kepala Sekolah SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo :

"Struktur birokrasi dalam implementasi PIP sangat penting karena menentukan bagaimana mekanisme dari pendataan hingga pencairan bantuan itu berjalan. Kami di sekolah mengikuti instruksi yang telah diberikan, mulai dari mendata siswa yang berhak menerima bantuan, mengusulkannya melalui Dapodik, hingga membantu wali murid dalam proses pencairan di bank penyalur." (Wawancara 26 Februari 2025).

Hal ini bisa dilihat dari proses pelaksanaan PIP di SDN Damarsi melibatkan tahapan yang jelas setiap pihak memiliki peran spesifik. Berikut alur pencairan bantuan PIP hingga di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo:

Gambar 2. Alur pencairan dana bantuan PIP



Sumber : Hasil olah data peneliti, 2025

Temuan di SDN Damarsi menunjukkan alur pencairan PIP yang terstruktur dengan peran jelas di tiap tingkat, sejalan dengan Harun (2021) mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Smpn 3 Banjarbaru Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru". yang menegaskan pentingnya koordinasi berjenjang antar instansi untuk distribusi bantuan tepat sasaran. Bedanya, di SDN Damarsi birokrasi berjalan baik namun terkendala kewenangan dan arus informasi. Perbandingan ini menegaskan bahwa struktur birokrasi saja tidak cukup komunikasi dan kelancaran teknis juga menentukan keberhasilan implementasi. Berdasarkan fenomena di lapangan mengenai struktur birokrasi dalam Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sesuai dengan indikator keberhasilan menurut teori Edward III (1980) . Hal ini terlihat dari alur pencairan yang terstruktur di mana setiap tahapan dalam proses pelaksanaan program memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari operator Dapodik, guru pendamping, wali kelas, hingga bank penyalur yang berjalan secara sistematis untuk memastikan bahwa bantuan dapat diterima oleh siswa yang berhak. Dengan adanya alur yang tertata dengan baik proses implementasi kebijakan dalam PIP menjadi lebih efektif, efisien, serta mendukung pencapaian tujuan program sesuai dengan prinsip birokrasi yang ditetapkan.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SDN Damarsi, Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut : Pertama, komunikasi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah dilakukan melalui berbagai cara, meliputi sosialisasi awal yang diberikan oleh pihak sekolah kepada orang tua siswa dan peserta didik yang menerima manfaat. Namun, dalam praktiknya, beberapa wali murid masih belum memahami prosedur pencairan bantuan PIP. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi masih dapat ditingkatkan agar seluruh penerima manfaat memahami prosedur dengan lebih baik. Kedua, Sumber daya dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah mencukupi dari segi tenaga pelaksana dan fasilitas administrasi yakni Kepala sekolah, guru pendamping PIP, operator PIP, serta wali kelas. Proses verifikasi dan pendataan siswa penerima manfaat juga telah dilakukan melalui sistem Dapodik, dengan memastikan bahwa hanya siswa yang memenuhi syarat yang diusulkan. Selain itu, sumber daya finansial juga telah digunakan dengan baik, di mana dana yang diterima selalu tersalurkan kepada penerima bantuan tanpa ada penyalahgunaan. Meskipun secara umum sumber daya telah mencukupi masih diperlukan penguatan dalam pengelolaan informasi dan administrasi agar proses seleksi dan pencairan bantuan dapat lebih transparan dan efisien. Ketiga, Disposisi Dalam pelaksanaan PIP, pihak sekolah berperan dalam mengusulkan siswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan, sedangkan keputusan akhir ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Namun, beberapa siswa yang

memenuhi syarat tidak selalu terakomodasi sebagai penerima bantuan, sementara ada yang tidak memenuhi kriteria tetapi tetap mendapat bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam proses seleksi penerima sehingga diperlukan evaluasi dan koordinasi yang lebih optimal antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan agar program yang dijalankan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Keempat, Struktur birokrasi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi dalam implementasi PIP di SDN Damarsi telah menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Struktur birokrasi yang diterapkan telah menunjukkan adanya sistem yang jelas dalam pelaksanaan program, mulai dari tahap penginputan data hingga pencairan dana. Setiap pihak memiliki tugas yang jelas, mulai dari penginputan data oleh operator PIP, pengecekan ulang oleh guru pendamping hingga pencairan dana di bank penyalur oleh siswa atau wali murid. Hanya saja, perlu adanya penguatan koordinasi dan komunikasi antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan orang tua, guna memastikan proses berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan dan pembawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini, terutama kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dukungan moril, serta motivasi tiada henti. Tidak kalah pentingnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing, memberi arahan, serta memberikan masukan berharga sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang terbaik. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada seluruh narasumber di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan informasi yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini. Tidak lupa, penulis mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa fasilitas, sumber daya, maupun motivasi, sehingga proses penelitian dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan mampu diselesaikan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua yang telah membantu dan mendukung, baik secara moril maupun materiil, dalam proses pengumpulan data, analisis, maupun penulisan laporan. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi ladang amal yang penuh keberkahan. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pelaksanaan kebijakan pendidikan, maupun sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi program pendidikan di Indonesia. Dengan penuh rasa syukur dan rendah hati, penulis menutup seluruh rangkaian ucapan terima kasih ini dan berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

REFERENSI

- [1] M. Al Amroni, M. Y. Alhadhaq, and N. Sumiati, “Efektivitas Bantuan Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kota Bandung,” *Equilib. J. Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 12, no. 2, p. 158, 2023, doi: 10.35906/equili.v12i2.1521.
- [2] Yogatama. Muhammad Arsy, H. M. Syafiqi, D. Andriantini Sintha Dewi, and D. Trisna Noviasari, “Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang,” *Borobudur Law Soc. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 9–15, 2024.
- [3] V. Septiandika, “Evaluasi Implementasi Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Bagi Siswa Kurang Mampu,” *J. Pedagog.*, vol. 4, no. 1, pp. 52–56, 2017.
- [4] F. Mulyaningrum, H. P. Pawestri, and Z. Zainudin, “Evaluasi Unsur Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada SMPN 1 Maospati Kabupaten Magetan,” *AKSIOMA J. Sains Ekon. dan Edukasi*, vol. 1, no. 6, pp. 276–286, 2024, doi: 10.62335/nwprts75.
- [5] I. Kaunang, I. Abdul, A. Maruwae, F. Bumulo, and A. Bahsoan, “Pengaruh Pemanfaatan Beasiswa Program Indonesia Pintar (Pip) Terhadap Motivasi Belajar Siswa,” *Damhil Educ. J.*, vol. 4, no. 1, p. 29, 2024, doi: 10.37905/dej.v4i1.2477.
- [6] A. S. Gutama, M. Fedryansyah, and E. Nuriyah, “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Implementation of the Kartu Indonesia Pintar (KIP) Based on the Value Basis of Justice in Social Policy,” *Penelit. dan Pengabdi.*, vol. 2, no. 3, p. 394, 2021.
- [7] B. G. Dimmera and P. D. P. Purnasari, “Permasalahan Dan Solusi Program Indonesia Pintar Dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Bengkayang,” *Sebatik*, vol. 24, no. 2, pp. 307–314, 2020, doi: 10.46984/sebatik.v24i2.1137.

- [8] A. Baihaqi, "IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI MTsN 3 HSU KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA," *Administraus*, vol. 7, no. (3), pp. 56–63, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.56662/administraus.v7i3.233>
- [9] T. Harun, "Implementasi Program Indonesia Pintar Pada Smpn 3 Banjarbaru Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru," *AS-SIYASAH J. Ilmu Sos. Dan Ilmu Polit.*, vol. 6, no. 1, p. 19, 2021, doi: 10.31602/as.v6i1.3858.
- [10] A. Anggleni, "Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang," *J. PPS UNISTI*, vol. 1, no. 1, pp. 24–39, 2018, doi: 10.48093/jiask.v1i1.3.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- [12] M. B. Miles and A. M. Huberman, *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications, 1994.
- [13] A. Annisa, "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar (Pip) Di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyusin," *J. Ilm. Adm. Dan Sos.*, vol. 18, no. 1, pp. 40–51, 2023, doi: 10.62128/jiads.v18i1.54.
- [14] Sri Kaidah, "Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Pendidikan Anak Dampak Program Indonesia Pintar Terhadap Pendidikan Anak Pada Keluarga Miskin," *J. Geuthèë Penelit. Multidisiplin*, vol. 05, no. 03, pp. 312–320, 2022, [Online]. Available: <http://www.journal.geutheeinstitute.com>.
- [15] A. Hidayanti, A. Parawangi, and Rasdiana, "Implementasi Sistem Informasi Publik Berbasis Website di Desa Taeng Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Kaji. Ilm. Mhs. Adm. Publik*, vol. 3, no. 6, pp. 1673–1686, 2022.
- [16] Nadia Nadia, Fitri Kurnianingsih, and Ramadhani Setiawan, "Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Tanjungpinang Tahun 2023," *Jemb. Huk. Kaji. ilmu Hukum, Sos. dan Adm. Negara*, vol. 1, no. 3, pp. 181–194, 2024, doi: 10.62383/jembatan.v1i3.521.
- [17] I. Hermawan and L. Mursyidah, "Kebijakan Indonesia Pintar Mengubah SMP Negeri 3 Krian Sidoarjo," *Indones. J. Public Adm. Rev.*, vol. 1, no. 3, p. 17, 2024, doi: 10.47134/par.v1i3.2836.
- [18] R. Hafrienda, C. Candradewini, and M. D. E. Munajat, "Efektivitas Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sma Negeri Di Kota Bukittinggi," *JANE - J. Adm. Negara*, vol. 14, no. 2, p. 697, 2023, doi: 10.24198/jane.v14i2.45140.
- [19] Romanti, "Implementasi Program Indonesia Pintar (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri 117 Pekanbaru)," *J. Ilm. Publika*, vol. 11, no. (1), p. 469, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8709>
- [20] B. Rahmadhani and N. A. A. Asmara, "Strategi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Melalui Kartu Indonesia Pintar Tingkat SMP Kota Bandung (SMPN 37 dan 35 Kota Bandung)," *Konf. Nas. Ilmu Adm.*, no. 1, pp. 244–250, 2021, [Online]. Available: <http://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view/645%0Ahttps://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/viewFile/645/214>
- [21] E. Nainah, U. Jamaludin, and F. A. Bahrudin, "Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar Sebagai Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara (Studi Deskriptif Di Smp Negeri 1 Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang-Banten)," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 12, no. 1, pp. 29–40, 2023, doi: 10.33366/jisip.v12i1.2598.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.